



## **IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN KEBUTUHAN PANGAN DI INDONESIA**

**Syafwatul Ummi**

Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: syafwatulummi22@gmail.com

### **Abstract**

Pancasila as the state ideology is a foundation in all things to realize and direct various development sectors. Various existing sectors must of course be linked to Pancasila, including the food sector. The development of food innovation in advancing food security must be in accordance with the principles of Pancasila in order to realize food security that is fair, sustainable, and oriented towards the welfare of all Indonesian people. The first principle of Pancasila is the basic reference in managing food in accordance with the mandate of God Almighty. The second principle of Pancasila as a driver for the desire to develop food innovation by ensuring fair and civilized contributions. The third principle emphasizes the importance of collaboration between the government and society in realizing Indonesian food innovation. The fourth principle emphasizes the principle of deliberation in building community participation in realizing food innovation, and the fifth principle emphasizes the principle that food must be able to meet the basic needs of all Indonesian citizens. This article aims to provide the implementation of Pancasila in carrying out the practice of developing food innovation in Indonesia and describe the challenges of food security based on Pancasila as the state ideology

**Keywords:** Implementation, Pancasila Values, Food needs.

### **Abstrak**

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sebuah landasan dalam segala hal untuk mewujudkan dan mengarahkan berbagai sektor pembangunan. Berbagai macam sektor yang ada tentu harus berlandaskan dengan Pancasila, termasuk pada sektor pangan. Perkembangan inovasi pangan dalam memajukan ketahanan pangan harus sesuai dengan sila-sila Pancasila agar mewujudkan ketahanan pangan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan segenap masyarakat Indonesia. Sila pertama dari Pancasila menjadi acuan dasar dalam mengelola pangan sesuai dengan amanah Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua Pancasila sebagai pendorong terhadap keberlanjutan perkembangan inovasi pangan dengan menjamin kontribusi yang adil dan beradab. Sila ketiga yang menggarisbawahi akan pentingnya sebuah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan pangan Indonesia. Sila keempat yang mengedepankan prinsip musyawarah dalam membangun partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan pangan, serta sila kelima yang menegaskan tentang prinsip pangan harus dapat memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk dapat memberikan implementasi Pancasila dalam praktik pengembangan kebutuhan pangan di Indonesia serta menggambarkan tantangan ketahanan pangan yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara.

**Kata kunci:** Implementasi, Nilai Pancasila, Kebutuhan pangan.



## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang memiliki berbagai hasil pertanian yang bervariasi. Masyarakat Indonesia sebagian besar ialah petani yang bercocok tanam sebagai mata pencaharian utama yang dimiliki. Sektor pertanian Indonesia menjadi sektor terbaik yang diunggulkan oleh pemerintah karena dapat memenuhi segala kebutuhan pangan warga negara. Pangan menjadi peranan terpenting dalam membangun sebuah negara karena pangan menjadi sumber energi bagi manusia. Kebutuhan pangan merupakan hal pokok yang dimiliki setiap warga negara dan harus dipenuhi demi kelangsungan hidup.

Negara memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan pangan warga negara. Melalui ini pemerintah memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan pangan warga negara. Pemerintah perlu memberikan sebuah formulasi mengenai kebijakan pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan seluruh warga negara. Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang luas dan masyarakat yang berprofesi di sektor pertanian bukan berarti pemenuhan kebutuhan pangan dapat mudah dipenuhi. Beberapa kendala pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan ialah kurangnya ketersediaan bahan pangan, lahan pertanian yang semakin berkurang, banyaknya pemukiman yang dibangun, dan lainnya.

Selain itu, ada faktor lain yang menjadi kendala dalam pemenuhan pangan yaitu teknologi produksi benih unggul dengan menggunakan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia dapat membuat lahan menjadi hilang kesuburannya sehingga mengalami degradasi lahan. Penguasaan akan teknologi pertanian yang masih rendah membuat mutu hasil panen menjadi terdegradasi. Kelembagaan produksi petani yang dikatakan masih dalam skala yang kecil dan kurangnya dukungan akan teknologi dan sarana prasarana pertanian yang menyebabkan kurangnya modal usaha tani di beberapa daerah.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan. Metode ini akan menganalisis apa saja kebijakan pangan yang ada di Indonesia yang dapat mengembangkan kebutuhan pangan secara merata. Metode ini memberikan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dengan mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah diambil. Kebijakan-kebijakan yang mencakup berupa ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya pertanian, dan pendistribusian pangan secara adil dan merata di setiap daerah. Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari pengembangan kebutuhan pangan secara merata kepada setiap kelompok masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.

## **Pembahasan**

Peranan Pancasila sebagai landasan dari segala hal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki fungsi sebagai penghubung antar segala bidang yang membangun negara. Pancasila menjadi sistem yang dipilih harus selaras dengan yang terkandung di dalamnya. Pengamalan nilai-nilai Pancasila ini yang nanti akan dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam segala hal. Nilai-nilai universal yang bersumber melalui budaya Indonesia yang sejak lama dipraktekkan nenek moyang terdahulu. Pengimplementasian nilai-nilai tersebut ke sebuah bentuk ideologi yang menjadi bentuk kerja keras para pendiri bangsa. Terdapat 5 nilai dasar Pancasila yang menjadi intisari, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat, dan nilai keadilan.

Setiap nilai Pancasila memiliki keterikatan satu dengan lainnya yang berdiri secara bersama. Selain sebagai sebuah landasan ideologi, Pancasila juga dijadikan sebagai sebuah sumber hukum yang berarti sebagai penentu aturan di masyarakat. Keterkaitan antara Pancasila dengan sektor pertanian ialah dalam kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pemenuhan bahan pangan dari sektor pertanian harus sesuai dengan landasan teori Pancasila yang mencakup 5 nilai dasar di dalamnya. Perumusan implementasi nilai-nilai dasar ini harus berisi secara keseluruhan kelima nilai tersebut. Hak akan kebutuhan pangan menjadi hak terpenting dari hak asasi manusia. Ketahanan pangan tidak dapat diterapkan jika beberapa aspek komunika yang efisien tidak hadir di dalamnya.



Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti dalam setiap kekayaan alam yang telah dianugerahkan oleh Tuhan YME seperti lahan pertanian yang luas, tanah yang subur, berbagai aneka hayati tanaman pangan yang dimiliki, serta iklim yang sesuai. Pemberian Tuhan seperti ini harus dijaga akan kelestariannya, khususnya tanaman yang menjadi bahan pangan pokok sebagai kebutuhan keberlangsungan hidup. Kekayaan alam yang telah dianugerahkan ini tentu tidak semena-mena digunakan, tetapi perlu dikelola dengan baik agar tetap ada. Pengelolaan kekayaan alam ini tentu harus dilakukan mengingat kebutuhan manusia akan pangan sepanjang waktunya.

Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang berarti persoalan tentang pangan merupakan hajat dari hidup banyak orang yang mesti dipenuhi. Pangan menjadi salah satu kebutuhan dalam kelangsungan hidup manusia. Apabila pengelolaan pangan dilakukan secara berantakan maka akan memberikan dampak yang fatal bagi kelangsungan hidup banyak manusia. Salah satu contoh yang sering kali dijumpai dari permasalahan ini ialah kasus kelaparan, gizi buruk, busung lapar, meningkatnya kriminalitas, bahkan terjadi peperangan. Hal-hal inilah yang menimbulkan perpecahan sesama bangsa dalam merebutkan sumber daya pangan. Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah dalam membuat kebijakan pangan nasional yang sesuai dengan nilai keberadaban. Pemerataan perlu dilakukan agar setiap warga negeri mendapatkan kebutuhan pangan yang merata dan tidak dibeda-bedakan.

Sila ketiga, “Persatuan Indonesia” yang berarti Indonesia memiliki rasa senasib dan sepenanggungan sehingga terwujudkan sikap persatuan. Sikap tersebut mendorong warga negara untuk hidup bersama dengan tujuan yang sama. Setiap daerah di Indonesia mempunyai sebuah keunggulan komparatif satu sama lain. Akan tetapi, belum semua daerah diberikan kebutuhan pangan yang cukup. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor seperti bencana alam di sebuah daerah sehingga terjadi gagal panen. Pemerintah harus dapat menempatkan kebijakan akan ketahanan pangan dengan nilai kesatuan dan persatuan. Batas dari produksi pangan nasional tidak dapat hanya dilihat pada beberapa kasus per wilayah tetapi dalam keseluruhan.

Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang berarti dalam setiap pengambilan keputusan harus ada sebuah musyawarah yang mufakat. Musyawarah menjadi salah satu jalan dalam mengatasi sebuah perbedaan pendapat yang ada. Perumusan nilai ini pada ketahanan pangan, yaitu melibatkan berbagai pemimpin, pemerintah, dan masyarakat dalam mengambil keputusan. Kebijakan tidak dapat diambil oleh beberapa pihak atau satu pihak saja karena ini menyangkut banyak orang.

Sila kelima, “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” yang berarti setiap manusia harus mendapatkan kebutuhan pangan yang adil. Kapasitas produksi akan pangan dipengaruhi oleh impor, distribusi, dan hal lainnya. Analisis kebijakan tersebut bukan perwilayah saja tetapi secara keseluruhan karena takut kekurangan di beberapa lainnya. Oleh karena itu, kebijakan akan pengembangan kebutuhan pangan nasional perlu memerhatikan aspek keadilan sehingga kebutuhan akan pangan menjadi merata. Terkadang, terjadi sebuah kesenjangan di beberapa daerah yang kebutuhan pangan yang dimiliki tidak merata. Tantangan dalam memastikan kesejahteraan yang tercipta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengatasi system pangan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai Pancasila diterapkan dengan beberapa cara.

Melalui sila pertama, kita diajak untuk selalu memanfaatkan dan menjaga segala sumber daya alam yang telah diberikan oleh Tuhan. Cara yang umum digunakan, seperti penerapan Teknik pertanian yang ramah lingkungan. Pengurangan eksploitasi tanah yang menggunakan pupuk kimia yang dapat berakibat pada hasil pangan. Masyarakat tentu harus mampu mengelola segala sumber pangan dengan baik agar ekosistem tetap seimbang. Sila kedua, adanya tuntutan dalam mewujudkan keadilan dan peradaban pangan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan. Pengimplementasian nilai Pancasila pada sila ini dengan mendistribusikan pangan secara adil dan merata. Pangan yang disebar harus dipastikan merata ke berbagai wilayah Indonesia, terutama pada wilayah terpencil. Melalui hal ini, diharapkan tidak ada lagi kasus kelaparan, kekurangan gizi, dan kekurangan pasokan pangan. Pemerintah tentu harus membuat adanya program yang dapat membantu masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan pangan. Selain itu,



diberikan sebuah edukasi akan pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencegah masalah gizi buruk.

Sila ketiga, yaitu penguatan ketahanan pangan nasional yang mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui hal ini, harus terwujud adanya kedaulatan pangan dengan memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tanpa impor dari luar negeri. Hal ini, penting agar ketahanan pangan nasional tidak rentan akan fluktuasi harga global. Penting juga untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada para petani dalam mengakses teknologi pertanian pangan lokal. Dalam hal ini, kita juga harus dapat mengurangi ketergantungan dengan produk dari luar negeri sehingga tercipta ketahanan pangan lokal. Selain itu, Pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti irigasi, jalan distribusi pangan, dan pasar untuk meningkatkan akses pangan ke seluruh daerah.

Sila keempat, yaitu perwakilan pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Melalui sila ini, ditekankan adanya musyawarah dalam mengambil berbagai Keputusan yang ada. Hal ini tentu masyarakat harus berpartisipasi agar perumusan masalah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi. Pengambilan keputusan ini tentu harus mempertimbangkan kesejahteraan petani dan konsumen. Melalui hal ini tetap harus mengedepankan kearifan lokal dan menghormati tradisi setiap daerah yang ada. Cara yang dilakukan ialah dengan menggunakan bahan pangan lokal setiap daerah dan disamakan dengan pola makan setempat.

Sila kelima, yaitu kesejahteraan rakyat melalui Pembangunan system pangan yang adil dan merata. Melalui sila ini kita diharapkan untuk membangun keadilan bagi setiap rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pangan yang bergizi dan cukup. Peran negara disini ialah memastikan tidak ada lagi lapisan masyarakat yang kelaparan maupun kekurangan gizi. Oleh karena itu, perlu adanya pengambilan kebijakan pangan yang inklusif yang memperhatikan setiap lapisan masyarakat, terutama masyarakat golongan miskin dan rentan. Program-program tersebut diciptakan agar mengurangi adanya kesenjangan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Cara lainnya dengan mengurangi ketimpangan dalam akses pangan, yaitu dibangun sektor pertanian yang merata di beberapa daerah yang terabaikan.

Beberapa nilai-nilai Pancasila tidak terimplementasikan dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap ketahanan pangan nasional. Kelemahan pangan yang terjadi disebabkan karena pendistribusian pangan yang lambat sehingga pengembangan kebutuhan pangan tidak merata. Ketahanan pangan yang lemah dapat menyebabkan daya beli akan bahan pangan berkurang, masyarakat sulit memperoleh bahan pangan yang berkualitas baik dan aman. Setiap sila dalam Pancasila menawarkan perspektif yang mendalam mengenai bagaimana kita harus mengelola dan memanfaatkan sektor pangan, mulai dari pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana, pemerataan akses pangan, hingga penciptaan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, kita dapat merancang sistem pangan yang tidak hanya mampu menghadapi tantangan sekarang, tetapi juga dapat bertahan dan berkembang di masa depan, untuk generasi yang lebih baik.

## **Kesimpulan**

Pancasila menjadi landasan teori dalam mengambil segala keputusan hingga pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Implementasi dari kelima sila Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat, dan nilai keadilan. Pengamalan dari nilai tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi pengembangan pangan sebagai kebutuhan primer. Kebutuhan akan pangan harus meliputi 5 nilai dasar Pancasila. Pemberian Tuhan akan kekayaan alam yang melimpah harus dikelola dengan baik serta dilakukan pemerataan kebutuhan pangan agar setiap lapisan masyarakat merasakannya. Melalui nilai Pancasila inilah terwujudnya sebuah ketahanan pangan nasional yang kuat di setiap wilayah secara merata. Dampak dari ketahanan pangan yang tidak merata ialah busung lapar, gizi buruk, dan timbulnya kriminalitas. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia,



## JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY

ISSN (ONLINE): 2809-8080. ISSN (PRINT): 2809-9540

<https://ejournalsjp.lkispol.or.id>

Volume 3 Number 3 May 2024

memberikan nilai-nilai yang sangat relevan dalam membangun sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan dapat mengatasi berbagai tantangan. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, Indonesia dapat mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, yang tidak hanya menjamin kecukupan pangan tetapi juga merata di seluruh rakyat. Hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pangan yang tidak hanya memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Anugerah, Boy. 2021. Penguatan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani : pangan dalam perspektif ideologi Pancasila.
- Lalengke, Wilson. 2012. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Jurnalis Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional RI, Jakarta.
- Yuniar, Ririt. 2022. *Jembatan Emas Ketahanan Pangan*. Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.